

# KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA KOTA PALEMBANG ( STUDI KASUS PUSAT KOTA PINGGIR KOTA )

Lesi Hertati \*)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan antar rumah tangga Kota Palembang. Pengambilan sampel dilakukan pada dua kecamatan dan masing-masing kecamatan diambil satu kelurahan dan masing-masing kelurahan diambil dua Rukun Tetangga dan tidak ada kesulitan dalam pengambilannya. Hasil Analisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan analisis dengan metode koefisien Gini. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi pendapatan antar rumah tangga wilayah yang diteliti Pusat Kota (24 ilir) dan Pinggir Kota (desa Talang Kemang) merata atau tidak. Hasil Indeks Gini keseluruhan antara Pusat Kota dan Pinggir Kota di wilayah Kota Palembang terjadi ketidakmerataan 0.38, angka ini tergolong ketidakmerataan sedang atau menengah. Sedangkan di Pusat Kota sendiri terjadi ketidakmerataan rendah yaitu 0.27. Dan di Pinggir Kota terjadi ketidakmerataan rendah yaitu 0.12. Hasil perhitungan Indeks atau koefisien Gini salah satu faktor yang erat kaitannya dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat bersumber dari berbagai hal, seperti pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah dan ketidakmerataan pendapatan antara Pusat Kota dan Pinggir Kota. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan ketrampilan khususnya penduduk usia kerja.

**Kata Kunci :** *Ketidakerataan, Distribusi Pendapatan, Indeks Gini.*

### Pendahuluan

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999: 11). Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi mempunyai kaitan dan pengaruh yang akan tercermin pada kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Indikator dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto (Anwar, 1992: 3).

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan

yang ingin dicapai. Meskipun demikian pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena acapkali diperlukan perubahan dan perombakan yang dapat membuat pembangunan tersebut menjadi lebih tepat dan dapat dirasakan oleh setiap penduduk (Nurlina, 2003: 27).

Dalam proses pembangunan, masalah kependudukan perlu menjadi perhatian antara lain adalah jumlah dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan sedangkan jika kualitas baik maka akan dapat menjadi modal pembangunan (Andi, 2005: 1). Sebab pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan kualitas yang baik menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan.

Namun keberhasilan pembangunan dalam suatu negara

---

\*) Dosen FE STIER Muba

tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto serta Pendapatan Nasional per kapita (Rudatin, 2000: 1). Keberhasilan pembangunan juga diukur dari keberhasilan usaha negara tersebut untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil serta dapat mengurangi kemiskinan absolut.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat bersumber dari berbagai hal, seperti pendidikan yang rendah, ketidakseimbangan dalam kepadatan penduduk, pendapatan per kapita yang rendah dan ketidakmerataan pembangunan antara kota-kota, antardesa dan antarkota. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat terjadi juga karena faktor ketidakmerataan akses yang diperoleh seperti, akses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, akses terhadap informasi lapangan kerja (Nurlina, 2003: 106). Dengan kata lain ada perbedaan kesempatan untuk memperoleh berbagai akses tersebut.

Oleh karena itu golongan masyarakat yang mendapat kesempatan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi akan berusaha untuk memperbesar bagiannya, sedangkan golongan masyarakat yang tidak beruntung akan menerima bagian yang kecil (Arndt, 1987: 23). Bagi golongan yang berpendapatan rendah kesempatan untuk memperoleh berbagai akses juga rendah.

Persoalan pemerataan pendapatan dapat di per kecil selama pertumbuhan ekonomi dinikmati secara adil oleh masyarakat (Rokhim, 2006: 2). Persoalan akan muncul jika terjadi perubahan status quo dari golongan kaya dan golongan miskin, berupa perbedaan tingkat pendapatan

yang semakin melebar. Terlebih lagi bila perbedaan yang semakin lebar ini akibat dari perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah dapat terjadi antara Pusat Kota dan Pinggir Kota (*periphery*). Masyarakat di Pusat Kota relatif lebih sejahtera dari masyarakat yang di Pinggir Kota atau dengan kata lain masyarakat di Pinggir Kota lebih miskin (Emil: 2004: 3). Mereka yang berada di Pusat Kota menerima fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih baik dari masyarakat yang tinggal di Pinggir Kota. Kota sebagai pusat pertumbuhan seharusnya dapat memberikan efek peneteskan ke bawah (*trickle down effect*) terhadap daerah Pinggir Kota. Akan tetapi kenyataan sebaliknya, yang terjadi pertumbuhan kota menimbulkan efek pengurasan sumber daya dari daerah sekitarnya (Rustiadi dkk, 2004: 4; Nurmanaf 2004:3).

Pola pembangunan yang mendahulukan pembangunan di Pusat Kota, karena di Pusat Kota tersedia pelayanan jasa pemerintahan pembangunan jasa pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Susetya, 2007, 5). Sementara di Pinggir Kota karena ketersediaan fasilitas relatif kurang maka pembangunan berjalan lambat. Meskipun demikian tidak semua masyarakat di Pusat Kota berada dalam kesejahteraan yang relatif sama. Dalam arti di Pusat Kota terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan sebagaimana yang terjadi juga di masyarakat Pinggir Kota (Metoty 2000: 6).

Jika jumlah penduduk miskin relatif banyak maka akan membuka peluang timbulnya masalah yang dapat mengancam proses keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu,

kebijakan pembangunan yang mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting dalam pembangunan, khususnya upaya pengurangi penduduk miskin merupakan hal yang sangat positif (Prasetyawan, 1998: 12).

Namun apakah semua penduduk yang berada di Pusat Kota berada dalam tingkat kesejahteraan yang sama, atau apakah semua penduduk di daerah Pinggir Kota dalam tingkat kemiskinan yang sama? Pertanyaan ini akan dibuktikan secara empiris seberapa jauh tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan antarPusat Kota dengan Pinggir Kota dan antarmasyarakat di Pusat Kota dan masyarakat yang tinggal di Pinggir Kota.

Tujuan pembangunan ekonomi yang harus dicapai adalah agar pendapatan masyarakat meningkat dengan cara memacu pertumbuhan sehingga hasil dari pertumbuhan dapat didistribusikan secara merata. Karena itu masalah distribusi pendapatan menjadi masalah yang cukup penting (Boediono, 1999: 1).

Akan tetapi Kuncoro (2006: 155) menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu disertai dengan distribusi pendapatan yang merata dan biasanya terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan *distribusi pendapatan*. *Trade off* yang terjadi membawa implikasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Namun Kuznets dalam Todaro (2000: 207) berpendapat lain bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya akan membaik. Berdasarkan pendapat Kuznets ini berarti kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi adalah

mutlak diperlukan. Pendapat Kuznets dikenal dengan kurva U terbalik.

Umumnya, distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua (Sagir, 2006: 5) yakni distribusi pendapatan fungsional (*functional distribution of income*) dan distribusi pendapatan personal (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan fungsional adalah distribusi pendapatan berdasarkan fungsi kepemilikan faktor input, misalnya sebagai pemilik modal atau pekerja; sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan personal adalah menyangkut distribusi pendapatan antara perorangan atau antara kelompok rumah tangga dalam masyarakat tanpa mempersoalkan sumber pendapatannya apakah berasal dari upah, sewa atau lainnya. Ketidakmerataan distribusi pendapatan fungsional akan terjadi antara para pekerja sebagai penerima upah dengan para pemilik modal sebagai penerima sewa modal. Sekelompok kecil pemilik modal menerima distribusi yang relatif besar dari total pendapatan, sedangkan kelompok pekerja yang jumlahnya mayoritas menerima bagian yang relatif kecil. Pola distribusi pendapatan yang demikian tentu tidak diinginkan, karena tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat (Hasibuan, 1996: 2).

Ketidakmerataan distribusi pendapatan personal terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya atau anantara kelompok rumah tangga dengan rumah tangga lainnya tanpa melihat fungsi masing-masing apakah sebagai pekerja atau pemilik modal (Hasibuan, 1996: 4). Kajian ini akan memfokuskan pada distribusi pendapatan personal.

## Pengukuran Distribusi Pendapatan

Ada tiga pengukuran distribusi pendapatan yaitu kurva Lorenz, koefisien Gini Rasio, dan kriteria bank dunia. Kurva Lorenz dikembangkan oleh Lorenz pada tahun 1905 (lihat Nurlina, 2003) yang mengkaji distribusi pendapatan melalui hubungan antara kelompok penerima pendapatan dengan pendapatan. Tingkat ketidakmerataan tinggi bila rentang antara kurva Lorenz dan garis kesamaan AO (*line of equality*) adalah besar; sebaliknya tingkat ketidakmerataan rendah bila rentang antara kurva Lorenz dan garis kesamaan adalah kecil. Sementara koefisien Gini merupakan pengembangan dari kurva Lorenz yang mengukur distribusi pendapatan dari sangat setara/merata sempurna 0 sampai sangat tidak setara atau merata tidak sempurna 1 (Kuncoro, 2006: 155).

Nilai koefisien Gini atau indeks Gini (IG) berkisar dari 0 sampai 1. Nilai koefisien Gini sebesar 0 atau 1 pada kenyataannya tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin *distribusi pendapatan* mengalami merata sempurna nilai 0 atau tidak merata sempurna nilai 1 (Dumairy, 1996: 54).

Oshima dalam Nitisastro (1999: 3) membagi koefisien Gini di Indonesia dalam 3 bagian ketidakmerataan. Ketidakmerataan rendah bila angka Gini  $< 0,3$ , ketidakmerataan sedang bila angka Gini terletak antara  $0,3-0,4$  dan ketidakmerataan tinggi, bila angka Gini di  $> 0,4$ . Sementara menurut Todaro, (2000: 110) angka Gini antara  $0,20-0,35$  ketidakmerataan rendah, angka dari  $0,35-0,49$  ketidakmerataan sedang dan angka Gini  $0,50-0,70$  adalah ketidakmerataan yang tinggi. Ketidakmerataan rendah berarti distribusi pendapatan relatif paling baik, sebaliknya ketidakmerataan

tinggi bermakna distribusi pendapatan buruk.

Selanjutnya pengukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia (Nurlina, 2003: 26; Dumairy, 1996: 55) adalah dengan cara mengelompokkan penerima pendapatan ke dalam tiga kelompok, (1) Jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah total pendapatan suatu kelompok, maka distribusi pendapatan di kelompok tersebut mengalami ketidakmerataan yang tinggi. (2) Jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12 persen - 17 persen jumlah total pendapatan suatu kelompok, maka distribusi pendapatan di kelompok tersebut mengalami ketidakmerataan yang sedang/menengah. (3) Jika 20 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih besar dari 17 persen jumlah total pendapatan suatu kelompok, maka distribusi pendapatan di kelompok tersebut mengalami ketidakmerataan yang rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakmerataan distribusi pendapatan pusat kota dan pinggir kota di wilayah Kota Palembang khususnya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Ketidakmerataan distribusi pendapatan mencerminkan kondisi kesejahteraan/ kemiskinan penduduk baik dilihat secara kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Jika jumlah penduduk miskin relatif banyak maka akan membuka peluang timbulnya masalah yang dapat mengancam proses keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu,

- kebijakan pembangunan yang mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting, khususnya upaya pengurangi penduduk miskin merupakan hal yang sangat positif.
2. Sesuai dengan hasil penelitian ini, salah satu faktor yang erat kaitannya dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat bersumber dari berbagai hal, seperti pendidikan yang rendah, ketidak seimbangan dalam kepadatan penduduk, pendapatan yang rendah dan ketidakmerataan pembangunan antara pusat kota dan pinggir kota, dapat terjadi juga karena faktor ketidakmerataan akses yang diperoleh seperti, akses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, akses terhadap informasi lapangan kerja. Dengan kata lain ada perbedaan kesempatan untuk memperoleh berbagai akses tersebut.
  3. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan ketrampilan khususnya penduduk usia kerja baik di pusat kota maupun di pinggir kota ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak saja terjadi di pinggir kota tetapi juga terjadi di pusat kota. Hal ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan diantara keduanya berbeda. Penduduk di pusat kota jauh lebih modern dan mempunyai kebutuhan yang relatif lebih banyak dan beragam bila dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pinggir kota.
  4. Perlu upaya pemerintah memperhatikan masalah bantuan modal dan pendidikan khususnya masyarakat miskin, baik di pusat kota maupun di pinggir kota di wilayah Kota Palembang. Selama ini masih di jumpai adanya dikatomi antara kesejahteraan dan

kemiskinan di pusat kota dan pinggir kota, dimana pusat kota dianggap lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pinggir kota. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana ditemukan bahwa seseorang yang tinggal di pusat kota yang mempunyai pendidikan rendah ternyata lebih berisiko miskin dibandingkan seseorang yang tinggal di pinggir kota kecuali mereka yang mempunyai modal besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Swastika. 2005. *Data Susenas Bicara*. Jakarta: Susenas 2007
- Andry, Kuntoro, dkk. 2006. *Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian RI.
- Anwar. 1992. *Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto untuk Kesejahteraan Rakyat* <http://www.pdrb.org/globalrights/mapspdrb.html>. (diakses 16 Januari 2007).
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: Edisi empat, BPFE-UGM.
- Arndt, H.W. 1987. *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia Di Masa Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Badan Pusat Statistik, Palembang Dalam Angka 2005 - 2006.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: Edisi pertama, BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Christiananta, Budiman. 1986. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Pendapatan*, Ringkasan Desertasi disampaikan pada Kongres XI ISEI Tahun 1990. Bandung.

- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Jilid 3 Penerbit Erlangga. Emil, Bachrul. 2004. *Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (Urban Development Finance) Kota Prabumulih*. Penerbit: Kajian ekonomi dan Keuangan. Vol,8 No.1. Prabumulih.
- Esmara, Hendra. 1983. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PAU.EKUI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Metoty, News. 2000. *Fokus Atasi Kemiskinan*. [http:// www.metotynews.com](http://www.metotynews.com). (diakses tanggal 12 Januari 2007)
- Nitisastro, Widjojo. 1999. *Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurlina Tarmizi. 2005. *Gejolak Ekonomi, Kemiskinan Dan Alternatif Kebijakan Pengentasan*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
- Pemkot Palembang. 2006. *Desain Kawasan Agropolitan Gandus Dan Sekitarnya*. Palembang: Penerbit CV Beta Alamba Rekayasa.
- Prasetyawan, W. 1998. *Perlu Langkah kongkrit Mengatasi Penduduk Miskin*. Bisnis Indonesia, Sabtu 8 agustus 1998. <http://bisnis.go.id> (diakses tanggal 28 Pebruari 2007)
- Rokhim, Rofikoh. 2006. *Ekonomi di Simpang Jalan Pertumbuhan & kemiskinan*. Jurnal Bisnis Indonesia. Rudatin, A. 2000. " *Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Masyarakat di Desa Penerima Dana Pogram IDT*", Pusat penelitian dan Pengembangan Ekonomi Yogyakarta.
- Sagir, Suharsono. 2006. *Jangan Membangun Jika Hanya Memiskinkan*. Penerbit: Pikiran Rakyat.
- Soeratno, Arsyad.L. 1993. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: AMP YKPN. Yogyakarta.
- Susetyo, Didik. 2007. *Struktur Ruang Wilayah*. Palembang: Materi Regional. PPs UNSRI.
- Tambunan, Tulus. 1995. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Jakarta: Jilid I Penerbit Erlangga.